

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN LOKAL DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

Rizki Hidayat¹

Cladivo Qori Wandana²

Anas Malik³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Endro Suratmin, Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Bandar Lampung,
Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: r839410@gmail.com, cladivoqoriw@gmail.com,
anasmalik@radenintan.ac.id

Abstract. The aim of this research is to deeply analyze the implementation of regional autonomy policies in Lampung Province, specifically those related to efforts to enhance the capacity of Human Resources (HR) of local government officials and the local community, and to examine its impact on the local economy. Regional autonomy grants broad authority to local governments to manage their own affairs and internal resources, including HR, as a key to successful development. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach in several districts/cities in Lampung Province. Data were collected through in-depth interviews with stakeholders (local officials, academics, and business actors), observation of planning and budgetary documents, and analysis of secondary data related to HR indicators and regional economic growth. The results show that the implementation of regional autonomy has encouraged the Provincial Government of Lampung and the district/city governments to formulate various training, education, and competency development programs for civil servants (ASN) to improve the effectiveness of public services and governance. Furthermore, there are initiatives to increase HR capacity in local leading sectors, such

Received November 13, 2025; Revised November 26, 2025; December 12, 2025

*Corresponding author: r839410@gmail.com

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN LOKAL DI PROVINSI LAMPUNG

as agriculture, tourism, and creative industries, through vocational training and mentoring.

Keywords: *Regional Autonomy, Apparatus Capacity, Lampung Province.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Provinsi Lampung, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah dan masyarakat lokal, serta menelaah dampaknya terhadap perekonomian lokal. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangga dan sumber daya internal, termasuk SDM, sebagai kunci keberhasilan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan (pejabat daerah, akademisi, dan pelaku usaha), observasi dokumen perencanaan dan anggaran, serta analisis data sekunder terkait indikator SDM dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah telah mendorong Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan berbagai program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara (ASN) guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, terdapat inisiatif untuk meningkatkan kapasitas SDM di sektor-sektor unggulan lokal, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, melalui pelatihan vokasi dan pendampingan.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kapasitas Aparatur, Provinsi Lampung.

LATAR BELAKANG

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, kewenangan pengelolaan pembangunan dan penganggaran bergeser ke pemerintah provinsi/kabupaten/kota sehingga kapasitas pemerintahan daerah menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tujuan pembangunan lokal. Pergeseran kewenangan ini memberi peluang bagi daerah seperti

Provinsi Lampung untuk merancang kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai kebutuhan lokal, namun sekaligus menuntut kapasitas aparatur dan lembaga daerah yang memadai agar implementasi kebijakan berjalan efektif (Setiawan et al., 2022).

Di tingkat provinsi Lampung, data dan kajian ekonomi regional menunjukkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi masih menghadapi tantangan struktural termasuk kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja, ketergantungan pada sektor primer, dan disparitas antar wilayah kota-pedesaan, sehingga penguatan kapasitas SDM menjadi prioritas strategis untuk mendorong produktivitas dan penyerapan tenaga kerja lokal. Intervensi otonomi daerah yang tepat dapat memfokuskan program pendidikan vokasi, pelatihan aparatur, serta dukungan untuk UMKM agar manfaatnya langsung terasa pada penguatan ekonomi lokal (Dardanila & Sari, 2023).

Namun dalam praktiknya, beberapa studi menemukan adanya hambatan implementatif seperti keterbatasan kompetensi teknis aparatur, koordinasi antar-OPD yang lemah, serta masalah manajemen anggaran daerah yang mengurangi efektivitas program peningkatan SDM. Kesenjangan kapasitas ini sering menjadi penghambat utama sehingga otonomi yang sebenarnya memberi ruang kebijakan tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja dan pelayanan publik. Oleh karena itu penelitian yang menelaah keterkaitan antara implementasi otonomi, penguatan kapasitas SDM, dan keluaran ekonomi lokal menjadi penting (Tirtayasa, 2025).

Bukti empiris pada konteks nasional menunjukkan bahwa kapasitas Pemerintah Daerah baik dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, maupun tata kelola birokrasi berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pembangunan manusia dan penyediaan layanan publik. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa investasi kebijakan dalam pelatihan SDM aparatur dan perangkat lokal dapat memperkuat efektivitas otonomi daerah dalam meningkatkan indikator pembangunan manusia dan, pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu penelitian ini akan menghubungkan temuan nasional tersebut ke konteks Lampung agar rekomendasi kebijakan lebih kontekstual (Setiawan et al., 2022).

Dampak ekonomi lokal dari peningkatan kapasitas SDM melalui kebijakan otonomi dapat terlihat pada beberapa saluran: peningkatan produktivitas tenaga kerja,

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN LOKAL DI PROVINSI LAMPUNG

naiknya kualitas pelayanan publik (mendorong iklim investasi dan usaha), serta penguatan sektor-sektor bernilai tambah. Namun efek ini tidak otomatis; diperlukan analisis terhadap bagaimana program-program otonomi (mis. alokasi anggaran pelatihan, kebijakan pendidikan vokasi, insentif UMKM) diimplementasikan di Lampung dan sejauh mana mereka menjangkau kelompok rentan atau wilayah tertinggal. Studi ini akan mengevaluasi mekanisme tersebut untuk melihat faktor pembeda keberhasilan. Selain aspek teknis dan fiskal, dinamika politik lokal, kapabilitas institusi, dan budaya organisasi pemerintahan daerah memengaruhi hasil implementasi. Risiko seperti alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, lemahnya monitoring-evaluasi, atau praktik administrasi yang kurang transparan dapat mengurangi manfaat program peningkatan SDM. Oleh sebab itu penelitian ini akan memasukkan analisis faktor-faktor institusional dan governance sebagai variabel penting untuk memahami mengapa beberapa inisiatif otonomi berhasil sementara yang lain tidak (Sommaliagustina, 2019).

Dengan latar tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif **(a)** bagaimana implementasi otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM di Provinsi Lampung, **(b)** hambatan dan faktor pendukung keberhasilan implementasi, serta **(c)** dampak nyata terhadap indikator perekonomian lokal (mis. pertumbuhan ekonomi sektoral, penyerapan tenaga kerja, kinerja UMKM). Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan konkret bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Lampung untuk memaksimalkan manfaat otonomi daerah bagi pembangunan SDM dan ekonomi lokal.

KAJIAN TEORITIS

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Konsep Otonomi Daerah (regional autonomy / decentralization) menjadi landasan bagi upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah secara mandiri sesuai karakteristik lokal (Nababan & Shahrullah, 2021).

Menurut kerangka teoritis klasik dan modern termasuk teori desentralisasi fiskal desentralisasi dipandang sebagai mekanisme untuk mempercepat pembangunan daerah dengan memungkinkan pengalokasian sumber daya, anggaran, dan kebijakan sesuai kebutuhan lokal . Dalam konteks ini, keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada kapasitas kelembagaan lokal: struktur pemerintahan, kualitas aparat, dan sistem regulasi sehingga kapasitas kelembagaan menjadi variabel penting.

Dengan otonomi dan desentralisasi fiskal yang efektif, daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan spesifik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pembangunan SDM, yang pada gilirannya mendukung pembangunan local (Utama & Ismoyowati, 2023).

Human Capital / Pembangunan SDM sebagai Fondasi Ekonomi Lokal

Teori human capital menyatakan bahwa peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan pembinaan kompetensi merupakan faktor penting dalam mendongkrak produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, investasi pemerintah daerah pada pengembangan human capital (pendidikan, kesehatan, pelatihan aparatur/masyarakat) dianggap sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing daerah, kapasitas pelayanan publik, dan produktivitas ekonomi local (Dalam & Desentralisasi, 2017).

Beberapa penelitian empiris mendukung hal ini: misalnya, penelitian Rethinking of Local Autonomy and Fiscal Decentralization Policy: Can It Improve the Quality of Human Capital? A Case in Eastern Region of Indonesia menunjukkan bahwa belanja daerah pada pendidikan, kesehatan, dan belanja per kapita GRDP mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas SDM di wilayah timur Indonesia. Namun demikian, tidak semua belanja atau investasi daerah otomatis berdampak besar dalam studi tersebut, belanja modal (capital expenditure) ternyata tidak signifikan dalam mendorong peningkatan kualitas SDM (Prayoga et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam implementasi otonomi daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta dampaknya terhadap

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN LOKAL DI PROVINSI LAMPUNG

perekonomian lokal di Provinsi Lampung. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara kontekstual dan komprehensif sesuai kondisi nyata di lapangan (Siregar et al., 2024).

Penelitian dilakukan di beberapa wilayah di Provinsi Lampung, seperti Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pesawaran, yang dipilih secara purposive karena memiliki program pengembangan SDM yang relevan dengan fokus penelitian. Subjek penelitian terdiri atas pejabat pemerintah daerah, aparatur sipil negara (ASN), pelaku usaha lokal (UMKM dan sektor unggulan), serta akademisi. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan, laporan kinerja, serta data statistik terkait indikator SDM dan perekonomian lokal. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dengan bantuan pedoman wawancara dan lembar observasi untuk menjaga fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta dilakukan *member check* kepada informan untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi dengan kondisi yang sebenarnya. Secara konseptual, penelitian ini memposisikan implementasi otonomi daerah sebagai faktor pendorong peningkatan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat, yang selanjutnya diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan penguatan perekonomian lokal di Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data dan Informan

Penelitian ini melibatkan informan dari pemerintah provinsi/kabupaten (Bappeda, BKD/BKPSDM, Dinas terkait), ASN peserta program pengembangan kapasitas, pelaku UMKM/ pelaku sektor unggulan, serta akademisi. Data dokumen yang dianalisis meliputi RPJMD, Renstra OPD, laporan pelatihan BKPSDM, dan data makro daerah (BPS

Provinsi Lampung). Gambaran awal menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Lampung telah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan SDM, tetapi distribusi dan fokus program berbeda antar kabupaten/kota. Sumber data primer dari BKPSDM Bandar Lampung menunjukkan program pelatihan yang terstruktur (pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan), namun kesiapan infrastruktur dan dukungan kebijakan masih perlu penguatan (Yusuf & Purnomo, 2024).

Bentuk Implementasi Program Peningkatan Kapasitas SDM

Temuan lapangan memperlihatkan tiga pola utama implementasi: (1) program pelatihan aparatur (peningkatan kompetensi teknis dan manajerial ASN), (2) program vokasi dan pendampingan untuk tenaga kerja di sektor unggulan (pertanian, pariwisata, UMKM), dan (3) inisiatif peningkatan layanan publik melalui digitalisasi/peningkatan sistem informasi. Di beberapa OPD, kegiatan pelatihan diarahkan pada kebutuhan administratif dan layanan publik; di level sektor ekonomi lokal, terdapat program kolaboratif dengan perguruan tinggi dan LSM untuk pelatihan teknis. Hasil ini konsisten dengan kajian yang menunjukkan fokus daerah pada pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen peningkatan human capital dalam kerangka otonomi (Yusuf & Purnomo, 2024).

Dampak terhadap Kapasitas Aparatur dan Tenaga Kerja Lokal

Mayoritas informan (pejabat dan ASN) melaporkan peningkatan pemahaman prosedur birokrasi, kemampuan manajerial, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan tugas masing-masing setelah mengikuti program. Pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan vokasi melaporkan perbaikan keterampilan produksi dan pemasaran sederhana. Namun, dampak pada indikator kuantitatif (mis. produktivitas sektor, penyerapan tenaga kerja) bervariasi antar daerah dan tidak selalu dapat diatribusikan hanya pada program SDM faktor lain seperti akses pasar, infrastruktur, dan modal juga memainkan peran penting. Temuan ini sejalan dengan studi yang menyatakan bahwa belanja daerah untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap kualitas SDM, tetapi efeknya dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan program dan kemampuan institusi lokal (Prayoga et al., 2023).

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN LOKAL DI PROVINSI LAMPUNG

Dampak terhadap Perekonomian Lokal

Analisis wawancara dan dokumen menunjukkan indikator dampak jangka pendek berupa peningkatan keterampilan teknis dan perbaikan layanan publik yang mendukung iklim usaha (perizinan lebih cepat, layanan informasi). Dampak jangka menengah terlihat pada beberapa klaster (mis. UMKM kerajinan dan kelompok tani) yang mengalami perbaikan kualitas produk dan sedikit peningkatan akses pasar lokal. Namun, tidak semua wilayah menunjukkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sektoral yang signifikan selama periode pengamatan mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas SDM perlu dilengkapi dengan intervensi fiskal dan pasar agar menghasilkan output ekonomi yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa otonomi daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bila kapasitas kelembagaan dan pengelolaan fiskal daerah memadai (Yustianto et al., 2025).

Kendala Implementasi

Beberapa kendala utama yang ditemukan adalah: (a) keterbatasan anggaran yang memadai untuk program berkelanjutan; (b) koordinasi antar-OPD yang belum optimal sehingga terjadi duplikasi atau program tidak terintegrasi; (c) kapasitas monitoring-evaluasi yang lemah sehingga sulit menilai efektivitas program; dan (d) kesenjangan akses antara wilayah pusat kota dan daerah terpencil. Temuan ini sesuai dengan studi lain yang menunjukkan hambatan implementasi otonomi—terutama terkait kapasitas sumber daya manusia, manajemen anggaran, serta tata kelola pemerintahan daerah.

Diskusi: Mengaitkan Temuan Dengan Teori dan Studi Sebelumnya

Hasil penelitian menguatkan kerangka teoritis bahwa investasi pada human capital melalui kebijakan otonomi memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas aparatur dan sumber daya lokal, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kapabilitas kelembagaan daerah. Dengan kata lain, otonomi menyediakan ruang kebijakan; tetapi tanpa manajemen anggaran yang baik, perangkat M&E, dan koordinasi OPD, manfaatnya terfragmentasi. Studi kuantitatif sebelumnya juga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak

positif pada indikator pembangunan apabila didukung oleh kapasitas pemerintah lokal temuan ini sejalan dengan hasil studi pada konteks Indonesia timur dan kajian fiskal dekonsentrasi.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan, beberapa rekomendasi kebijakan adalah: (1) mengintegrasikan perencanaan pelatihan dengan kebutuhan sektor unggulan dan strategi ekonomi daerah; (2) memperkuat mekanisme monitoring-evaluasi untuk menilai outcome (bukan hanya output) pelatihan; (3) meningkatkan koordinasi antar-OPD melalui forum teknis dan sinkronisasi anggaran; dan (4) mengalokasikan dana yang lebih fokus pada program berkelanjutan yang menggabungkan pelatihan, akses modal kecil, dan akses pasar bagi UMKM. Implementasi rekomendasi ini akan meningkatkan peluang bahwa peningkatan kapasitas SDM benar-benar menimbulkan dampak ekonomi yang bermakna.

KESIMPULAN DAN SARAN

Contoh Saran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi otonomi daerah di Provinsi Lampung telah mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan aparatur dan pemberdayaan masyarakat di sektor unggulan. Program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan, kualitas pelayanan publik, serta dukungan awal bagi penguatan ekonomi lokal. Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi belum merata dan masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar-OPD, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada kewenangan, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat integrasi perencanaan program peningkatan SDM dengan strategi pembangunan ekonomi daerah serta memperbaiki koordinasi lintas OPD. Selain itu, diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi serta dukungan berkelanjutan berupa akses permodalan dan pasar bagi pelaku usaha lokal. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN LOKAL DI PROVINSI LAMPUNG

kajian dan menggunakan pendekatan kuantitatif agar dampak peningkatan kapasitas SDM terhadap perekonomian lokal dapat diukur lebih spesifik.

DAFTAR REFERENSI

- Dalam, P., & Desentralisasi, E. R. A. (2017). PRODUKTIFKAH HUMAN CAPITAL INVESTMENT OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM ERA DESENTRALISASI? Bambang Suprayitno, Tejo Nurseto , & Supriyanto. *Jurnal Economia*, 13(1), 39–55.
- Dardanila, M., & Sari, R. M. (2023). ANALISIS POTENSI DAN PROYEKSI PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 POTENTIAL ANALYSIS AND ECONOMIC PROJECTIONS LAMPUNG PROVINCE IN 2023. *Jurnal Kelitbangan*, 11(2), 145–160.
- Nababan, J. H., & Shahrullah, R. S. (2021). PERANAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH Jefri Harianto Nababan □ , Rina S. Shahrullah □□ Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 108–116.
- Prayoga, F., Ananda, C. F., & Brawijaya, U. (2023). RETHINKING OF LOCAL AUTONOMY AND FISCAL DECENTRALIZATION POLICY : CAN IT IMPROVE THE QUALITY OF HUMAN CAPITAL ? A CASE IN EASTERN REGION OF INDONESIA. *JIAE*, 11(2), 129–145.
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery : Lessons Learned from Decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 1–13.
- Siregar, A. Y., Murhayati, S., Studi, P., Pendidikan, M., Islam, A., Studi, P., Pendidikan, M., & Islam, A. (2024). Metodologi Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif : Kajian Konsep ,. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45305–45314.
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 43–57.

- Tirtayasa, Y. (2025). Problematika Implementasi Otonomi Daerah : Sebuah Kritik dan Evaluasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Keywords Abstrak Kata Kunci. *Yustisia Tirtayasa*, 5(3), 260–276.
- Utama, aisal Y., & Ismoyowati, D. (2023). ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING REGIONAL ECONOMIC GROWTH (CASE STUDY IN SOLO RAYA 2010-2018). *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, 8(1), 30–38.
- Yustianto, B. P., Epenetus, A. J., Rozika, T. F., Syarif, A., & Lampung, S. K. (2025). The Effect of Fiscal Decentralization on the Performance of Regional Apparatus Organizations. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (SAKMAN)*, 5(23), 161–171.
- Yusuf, R., & Purnomo, A. (2024). AN ANALYSIS OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AT THE PERSONNEL AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AGENCY. *Nnovator, Journal of General Business, Innovation and Entrepreneurship*, 1(3), 66–73.